

Bagian 1

Etikalitas Pemerintahan

Barangkali tak ada satupun negara di dunia dewasa ini yang memperlihatkan gejala dimana para pemimpinnya di pusat maupun lokal sudi bertarung kembali menjadi pejabat rendahan setelah sebelumnya duduk sebagai pejabat puncak baik mantan menteri, gubernur dan walikota tanpa malu-malu. Gejala unik lain misalnya pejabat kepala daerah menyeberang dan berkompetisi di daerah lain sebelum habis masa jabatannya, meluasnya oligarkhi di hampir semua sudut kekuasaan, atau dalam peristiwa terakhir kita menyaksikan dengan vulgar pasangan kepala daerah dilantik dalam buih, kecuali di Indonesia yang katanya wadah persilangan budaya antara timur dan barat. Mengutip Lombard (2012), "sungguh tak ada satu pun tempat di dunia ini kecuali mungkin Asia Tengah yang seperti Nusantara, menjadi tempat

Oleh: Dr. Muhadam Labolo

kehadiran hampir semua kebudayaan besar dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu". Di timur kita memperoleh berbagai filsafat tentang makna teologis yang membentuk pribadi bertanggungjawab tidak saja pada diri dan lingkungan, lebih dari itu kepada pencipta yang maha agung. Pemaknaan ketuhanan tadi mewujud dalam bentuk tanggungjawab horisontal (*hablumminnas*) dan vertikal (*hablumminallah*). Pada derajat horisontal tadi kita menggunakan berbagai perangkat sistem sosial yang memungkinkan kita baik sebagai kelompok yang memerintah maupun yang diperintah untuk saling mengontrol agar semaksimal mungkin hidup secara aman, nyaman dan wajar. Dalam perangkat sosial tersebut pula kita berusaha mendesain sistem yang menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dari sudut pandang input, proses dan ouputnya. Demikianlah seterusnya hingga ia tidak saja menghasilkan sistem yang baik, juga kualitas individu yang baik. Kualitas terbaik dari sedikit individu tersebut kita hadirkan dalam etalase kepemimpinan pemerintahan. Sisanya kita biarkan menjadi mayoritas yang siap dipimpin hingga waktu tertentu. Begitulah siklus pemerintahan dimanapun bumi ini kita pijak. Dalam filsafat timur yang dibakukan lewat kitab suci berskala makro seperti Zabur, Taurat, Injil dan Quran hingga rekaman peristiwa berupa perilaku dan ucapan para penyampai firman dan sabda tersebut kita diingatkan misalnya bahwa tiap-

tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perilaku kepemimpinannya di dunia dan akhirat. Konsekuensi dari akuntabilitas kepemimpinan diatas mengharuskan setiap kita dituntut untuk memilih pemimpin yang memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan kompetensinya baik general maupun teknis. Secara general ia dipersyaratkan memiliki kepadatan moral yang meletakkan setiap pemimpin sebagai *exemplary center* (Geertz, 1999), yaitu pusat percontohan atau suri tauladan sebagaimana diajarkan oleh para penyampai risalah dan pengikutnya. Dalam perspektif Islam umpamanya, standar kepemimpinan kita diajarkan tentang makna *siddiq*, *tabligh*, amanah dan *fatonah* kepada siapa saja, terlebih lagi pada mereka yang akan duduk di puncak-puncak kekuasaan. Dengan modal itu pemimpin diniscayakan suci, bersih tanpa noda, serta menjadi panutan masyarakat luas. Pemimpin demikian hanya mungkin jika ia lahir dan terdidik dalam tatanan masyarakat yang menjadikan aspek spiritual sebagai sumber tata nilai. Lewat proses penyerbukan yang cukup kredibilitasnya terekam dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ditengah masyarakat. Ia tercipta dalam proses selektif dalam masyarakat yang melahirkan kepercayaan penuh untuk menjadi pemimpin kelak. Tentu saja kepemimpinan dengan sentuhan filsafat timur tadi menghindari terpilihnya pemimpin yang gambaran

kredibilitas sebaliknya, keluar masuk buih lantaran mencederai kesucian dari nilai kepemimpinan itu sendiri. Jangankan pemimpinnya, tempat dimana para pemimpin hidup dan beraktivitas dipandang suci bahkan dikeramatkan kemudian. Karena nilai kepemimpinan dipandang sakral, maka mereka yang pernah menjadi pemimpin tak akan mungkin menurunkan derajatnya hanya untuk memburu jabatan rendah setelah menjabat sebagai pimpinan puncak, apalagi sampai menyeberang kesana kemari hanya untuk membuktikan diri layak menjadi penguasa di tempat lain. Ini tentu saja melanggar satu nilai dalam falsafah timur, yaitu pengingkaran terhadap amanah rakyat sekaligus menampilkan birahi kekuasaan yang teramat ambisius, terlepas dari berbagai alasan politis yang tersusun rapi lagi masuk akal.

Di penghujung barat kita juga mengimport seperangkat nilai sebagai standar untuk mendesain kepemimpinan pemerintahan. Filsafat barat yang mengagungkan akal pikiran sebagai landasan dalam menciptakan kriteria dan standar kepemimpinan memungkinkan kita untuk tidak saja mampu membedakan mana yang benar dan mana salah dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga bagaimana menghargai manusia dan kemanusiaan dengan segala hak dasar yang melekat didalamnya. Atas dasar itu kita percaya

bahwa etika sebagai suatu ilmu, tatanan nilai maupun keyakinan sekelompok orang tentang hal baik dan buruk menjadi prinsip dalam berbagai norma dan konsensus untuk mengendalikan siapa saja, baik mereka yang memerintah maupun yang diperintah. Kepada mereka yang memerintah tentu saja etika menjadi standar dalam perilaku kepemimpinan. Dengan etika yang dilandasi akal pikiran sehat kita setidaknya dapat membedakan mana makanan dan mana sampah. Makanan masuk lewat mulut, sampah keluar lewat anus, bukan sebaliknya. Melalui etika yang didasarkan pada akal pikiran sehat kita bisa meleraikan mana pemimpin dan mana penjahat. Pemimpin ditasbihkan dalam prosesi sakral di tempat suci dan terhormat, sedangkan penjahat ditahan dalam jeruji besi untuk dimanusiakan kembali. Jika ia dilantik sebagai pemimpin di tempat penjahat, maka siapakah dia sebenarnya? Pemimpin atau penjahat? Pemimpin sekaligus penjahat? Setengah pemimpin dan separuh penjahat? Tentu gejala demikian membingungkan kita semua yang pada suatu ketika bersepakat bahwa pemimpin dan penjahat tak ada bedanya. Kalau demikian bukankah suatu ketika kita bisa bersepakat bahwa toilet dan musholla tak ada bedanya. Bagi kita, sebersih dan sebagus apapun toilet di Mal Kelapa Gading tak etis kiranya jika digunakan sebagai tempat prosesi hari ulang tahun seseorang. Lewat etika kita juga dapat mengendalikan diri dari perasaan malu kalau turun

dari level jabatan puncak ke jabatan rendahan. Tentu saja rasa malu tadi akan membatasi libido kekuasaan yang maha luas. Dengan etika pula kita bisa membatasi kehendak yang luas dari setiap pemimpin agar bisa menuntaskan amanah setiap periode yang ditentukan oleh rakyat dalam konstitusi. Dengan begitu tak ada pemimpin yang terkesan mengkhianati pilihan rakyat selama lima tahun. Sesudahnya kita berikan kesempatan agar kembali berkompetisi atau memilih area yang lebih luas dari itu. Inilah nilai penting dari sentuhan timur dan barat yang selama ini kita tautkan dalam simpul Pancasila sebagai filosofi *groundslaag* berbangsa dan bernegara. Dalam realitas kekinian kita dapat menyaksikan bagaimana contoh pemimpin di Jerman dan Honduras mundur hanya karena ketidakpercayaan publik atas gelar pendidikannya. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana pemimpin China, Korea, Taiwan dan Jepang mundur karena kasus-kasus pelanggaran etika seperti tidak berada ditempat kerja saat rakyatnya sedang bermasalah, tersandung isu korupsi, salah mengeluarkan statement atau hanya karena ketidakfasehan berbahasa nasional sebagai indikasi rendahnya kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Kalau negara-negara dibelahan timur dan barat, demokratis, otoriter maupun totaliter, sosialis atau kapitalistik mampu menetapkan dan menegaskan nilai-nilai moral mereka kedalam norma dan sistem

nilai yang disepakati untuk menjaga keluhuran seorang pemimpin, lalu mengapa negara yang kaya akan budaya semacam ini tak terbetik sedikitpun untuk turut menjaga keluhuran kepemimpinan sebaik mereka?

Oleh: Dr. Muhadam Labolo

Bagian 2

Pemimpin, Penjara dan Etika Pemerintahan

Pemimpin, penjara dan etika pemerintahan adalah konsep yang berbeda-beda. Pemimpin dalam berbagai makna umum diartikan sebagai orang yang mampu mempengaruhi melalui kewibawaan komunikasi sehingga orang lain dengan senang hati maupun terpaksa mengikuti tujuan dan kehendak tertentu. Demikian setidaknya menurut Cleeton, Mason, Tead, Pigors, Stogdill, maupun Steers. Pemimpin tentu saja menjadi semacam exemplary center kata Clifford Geerts, yaitu pusat teladan bagi pengikutnya. Pemimpin idealnya berada di puncak-puncak kekuasaan, dilayani dan melayani siapa saja. Demikian prestisiusnya konsep pemimpin dan kepemimpinan tersebut maka ketika mereka gagal menjalankan amanah pengikutnya, hidup mereka seringkali berakhir di penjara. Penjara hanyalah sebuah tempat dimana hidup sekumpulan

individu yang untuk sementara waktu gagal meningkatkan kualitas dirinya di tengah sistem sosial masyarakat. Dalam makna lain kita mengenal istilah lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai konsep dasar yang bergeser dari tempat penahanan menjadi tempat pelembagaan individu bermasalah kedalam masyarakat. Etika sendiri kita pahami sebagai seperangkat nilai, suatu ilmu maupun pemahaman sekelompok orang tentang hal baik dan buruk dalam masyarakat. Etika, dalam bahasa Yunani disebut *ethos*, artinya kebiasaan atau watak. Etika dihubungkan dengan ukuran-ukuran nilai moral yang ingin dilekatkan kepada suatu gejala kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern, etika dihubungkan dengan profesi tertentu, misalnya kedokteran, kewartawanan, kemiliteran, kepolitikan, kekuasaan atau pemerintahan. Berkenaan dengan etika pemerintahan menunjuk pada perilaku baik-buruk dalam interaksi pemerintahan apakah menyangkut personifikasinya, lembaganya, prosesnya maupun sistem dimana semua itu dilaksanakan. Mengapa kita membicarakannya? Karena etika dapat membentengi pemimpin agar tak hilir mudik ke penjara. Penjara sendiri menjadi sekolah luar biasa yang dapat menghasilkan kesadaran bermasyarakat. Sedangkan pemimpin dapat mengendalikan keduanya, penjara dan etika itu sendirinya. Kini, bagaimanakah jika pemimpin dan penjara bertemu dalam sebuah prosesi pelantikan menurut kerangka

etika pemerintahan? Faktanya, seperempat penghuni penjara di dunia berisi para pemimpin Gangsters, Mafioso, Yakuza, hingga pemimpin pemerintahan dalam skala lokal, nasional dan international. Untuk yang terakhir tadi tentu saja berkaitan dengan banyak masalah korupsi, sisanya tahanan politik. Sejumlah pemimpin yang dipenjara karena masalah politik cenderung cemerlang setelah kembali kedalam masyarakat, tengok saja Nelson Mandela dan para founding fathers kita. Disini lembaga semacam itu tidak saja berperan menahan seseorang, sekaligus mendewasakan karakter seseorang agar semakin tangguh menjadi pemimpin. Para pemimpin yang terlibat korupsi diawali dari budaya nepotisme dan kolusi. Korupsi dominan mengidap pada pemimpin yang sedang berkuasa apalagi jika ia bersifat absolut, sindir Lord Acton. Tetapi mengapa banyak pemimpin tak selalu berakhir di penjara? Saya pikir inilah makna kekuasaan jika dipahami sebagai melayani, bukan dilayani. Melayani melahirkan tanggungjawab, sedangkan dilayani memunculkan perasaan kenikmatan. Konsekuensi pertama melahirkan kebaikan bagi orang banyak (commons good), sisanya adalah kenikmatan bagi diri sendiri. Disinilah pemimpin lazim dihormati sebagaimana kita saksikan dimana saja. Guna menjaga tanggungjawab diatas, maka seorang pemimpin berusaha menjaga kehormatannya agar tak tercela sedikit pun di mata publik yang beresiko menghilangkan kepercayaan

yang diberikan kepadanya. Itulah mengapa banyak pemimpin memilih mundur dari jabatan sekalipun untuk hal-hal yang dipandang hanya melanggar kehormatan sebelum lebih jauh mendekam dalam penjara. Bagi para pemimpin tadi, melanggar etika kepemimpinan jauh lebih berbahaya daripada sekedar melanggar hukum positif. Etika dinilai sebagai rahim dari hukum positif, jadi melanggar etika sama saja melanggar hukum positif. Kasus pengunduran diri Kanselir Jerman dan Presiden Honduras dalam isu plagiat disertai jika dipertimbangkan bukanlah masalah pelanggaran serius dalam hukum masyarakat, namun ini berkaitan dengan etika, yaitu kebohongan publik. Pengunduran diri pemimpin Korea akibat bermain golf disaat masyarakat dalam belitan masalah, atau kasus dimana salah satu Perdana Menteri Jepang mundur hanya karena kurang fasih berbahasa leluhur menunjukkan sebuah tanggungjawab yang tinggi dalam soal menjaga kehormatan seorang pemimpin. Lalu bagaimanakah etika pemerintahan kita dewasa ini? Kasus pelantikan Bupati Mesuji di Lembaga Pemasarakatan oleh Gubernur Lampung (2012) mengingatkan kita pada masalah yang hampir mirip beberapa tahun lalu pada Walikota Tomohon. Bahkan ia sempat melantik eselon dua dan tiga dari balik jeruji besi. Dalam konteks hukum positif tentu saja tak ada se-ayat pun aturan yang dilanggar baik oleh yang melantik maupun yang dilantik, tetapi apakah

hal demikian patut menurut etika publik, apalagi etika pemerintahan? Kita semua pasti menjawab serentak, tidak, sebab sejauh ini kita tak memiliki undang-undang etika publik apalagi etika pemerintahan sebagai batasan bagi perilaku baik dan buruk. Dalam kasus pelantikan tersebut mungkin bukan person, lembaga atau prosesnya yang bermasalah, tetapi mekanisme pelantikan yang menjadi persoalan. Secara logika ada dua peran pada orang yang dilantik, yaitu sebagai pejabat negara sekaligus tersangka. Publik dibuat bimbang, apakah kita sedang menyaksikan prosesi pelantikan seorang pejabat atau tersangka, atau keduanya sekaligus? Saya pikir ilmu hukum positif tak bisa menjawab masalah ini, kecuali melihatnya dalam kerangka etika pemerintahan. Kalau negara komunis China, penyembah Matahari Jepang, atau pembantai kaum Yahudi, Jerman saja memiliki etika bagi kepemimpinan pemerintahan mereka, mengapa negara yang dipenuhi berbagai nilai dan tradisi luhur tak memiliki standar etika umum untuk mengukur baik-buruk setiap perilaku dalam proses kepemimpinan pemerintahan? Etika memang bukan hukum positif, tetapi bukankah etika sebagai seperangkat nilai tentang baik-buruk dapat kita sepakati bersama dari Sabang sampai Merauke untuk mengukur perilaku dalam peristiwa kepemimpinan pemerintahan. Kalau ini kita sepakati, maka semua perilaku tak senonoh para pemimpin tak perlu menunggu keputusan seorang hakim menjatuhkan

vonis, kecuali mundur. Ini dapat mengurangi tingkat ketegangan publik, meredakan konflik vertikal dan horisontal, serta menghemat energi dalam polemik yang berlarut-larut. Kita mesti memberi apresiasi jika ada anggota legislatif yang mundur hanya karena tak sengaja menikmati situs pornografi saat sidang di Senayan, atau menanggalkan jabatan menteri karena tersandung istri simpanan, termasuk mundur sebagai pemimpin partai politik ketika terpilih sebagai pejabat negara. Tak mundur dari jabatan memang tak melanggar hukum, tetapi bukankah sudah cukup melanggar etika publik? Bukankah hukum tak selalu mesti tertulis? Inggris adalah contoh dimana hukum tak tertulis (*unwriter constitution*) tetap berlaku dan menjadi pondasi kuat bagi hukum tertulis. Dengan demikian seorang pelanggar bisa jadi tak perlu masuk penjara, tetapi mengundurkan diri dari sebuah jabatan sudah cukup menjadi hukuman sosial yang jauh lebih membekas seumur hidup. Kalau ini kita lupakan, maka sebenarnya kita telah mengosongkan realitas hukum sosial yang tumbuh dalam masyarakat sebagai sumber hukum awal. Dalam pengetahuan hukum saya yang terbatas, saya selalu memahami bahwa hukum tanpa sentuhan sosiologi ia hanyalah hukum yang bersifat formal dan gampang mati di tengah dinamika sosial, disini kita mesti merawat dan mengembangkan hukum sosial yang hidup dalam masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran etis semacam kasus diatas

secara fungsional. Pendekatan demikian setidaknya dapat menghidupkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Bukankah membawa setiap masalah ke lembaga hukum formal hanya akan menghabiskan waktu, uang dan tenaga yang belum pasti memberikan keadilan sebagai tujuan akhir? Kembali pada kasus Mesuji dan Tomohon sekali lagi mungkin tak ada pelanggaran dalam hukum positif, apalagi jika sang pejabat belum diputus secara final and binding. Tetapi bagaimanapun itu, menurut nurani sehat kita menyatakan bahwa melantik dalam penjara atau mempertemukan konsep kepemimpinan yang sakral dalam penjara yang memiliki makna sebaliknya tentulah sesuatu yang tak elok dipandang mata. Ironisnya gejala demikian hanya ada di Indonesia dengan logika kepastian hukum bagi setiap orang. Melantik seseorang dimana saja memang tak mesti diukur dengan etika, apalagi jika ia benar pemenang pemilu yang mewakili sebagian rakyat. Namun fenomena demikian menunjukkan adanya kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial). Faktor lain adalah kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri serta adanya tekanan luar untuk berbuat tidak etis. Atau jangan-jangan pelantikan semacam itu dikarenakan fasilitas di lembaga pemasyarakatan sudah jauh lebih baik daripada fasilitas di kantor-kantor pemerintahan? Kalau alasan pragmatisnya demikian, mungkin masuk akal, sebab menurut

beberapa sumber terpercaya bahwa ukuran lauk-pauk mereka lebih tinggi dibanding lauk-pauk pegawai negeri biasa, bahkan standar rupiahnya masih lebih tinggi dibanding lauk-pauk Mahasiswa pendidikan kedinasan di tempat saya. Toilet, tempat tidur, kulkas, TV dan AC di lembaga pemasyarakatan setaraf lebih nyaman dibanding hotel bintang tiga di Jakarta, lihat saja kamar Melinda dan kawan senasibnya. Kalau masalah estetika argumentasinya, saran saya kepada semua Pemda hanya satu, segeralah bersolek diri agar fasilitas pemerintahannya jauh lebih pantas untuk melantik seorang kepala daerah daripada lembaga pemasyarakatan. Pendapat saya, sebersih apapun toilet di Mall Pejaten Village tetaplah konsep dasarnya adalah penampung kotoran, sehingga tak patut dan tak wajar kita gunakan sebagai prosesi sakral semacam ulang tahun anak kita. Penjara, sebaik apapun itu, konsep dasarnya adalah tempat dimana mereka yang bermasalah secara sosial ditahan. Kalau penjara kemudian berkembang menjadi lebih modern dan manusiawi seperti saat ini, bukankah tidak berarti ia pantas dijadikan tempat pelantikan seorang kepala daerah yang pada dasarnya adalah pejabat negara sekaligus *exemplary center* sebagaimana diingatkan Geerts. Mungkin cara praktisnya adalah mengeluarkan tersangka untuk dilantik menjadi pejabat di Pemda sehari, lalu mengembalikan yang bersangkutan ke bilik penjara sebagai tersangka kembali. Kita ingat kasus Bupati Bone Bolango (2010) saat dilantik ia

menerima SK sebagai Kepala Daerah, namun pada saat yang sama ia menerima SK pemberhentian sementara hingga memperoleh kepastian hukum dimuka pengadilan. Saya kira kelemahan hukum dalam aliran positivistik selama ini adalah selalu melihat realitas masalah dalam masyarakat secara linier lewat kaca mata kuda, hitam putih, apalagi jika ia kehilangan sandaran dalam konteks sosiologis. Maka jadilah hukum hanyalah seperangkat aturan dalam bentuk undang-undang dan qonun yang mewujud dalam hukuman kurungan, denda, cambuk dan rajam, jauh dari upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan seseorang sebagaimana tujuan hukum diantaranya. Pantaslah jika aliran post modernism mengingatkan kita tentang pentingnya melihat realitas sosial sebagai dinamika yang terus berkembang dan berubah-ubah, bukan sesuatu yang konstan sehingga dapat dibedakan secara hitam-putih. Ruang kosong semacam tadi kiranya membutuhkan kajian lebih lanjut dari aspek etika pemerintahan guna menjadi petunjuk bagi siapapun yang bersentuhan dengan praktek-praktek pemerintahan dewasa ini. Inilah negara yang berdiri diatas supremasi hukum namun kering dari aspek etikalitas berpemerintahan.

Oleh: Dr. Muhadam Labolo

Bagian 3

Relasi Etik Dalam Dinamika Sosial

Pasca ibadah monumental puasa kita sering dihadapkan pada sejumlah konflik di tanah air. Konflik berbentuk perkelahian antar kampung hingga bertumbuhnya aliran sesat yang entah darimana asal muasalnya hadir disekeliling kita. Kita seperti disadarkan bahwa puasa sebulan penuh tak serta merta melahirkan individu yang berkualitas (baca:bertaqwa), sebagaimana harapan Tuhan dalam Qur'an Surah Al-Baqorah ayat 183 (laalakum tattaqun). Sejatinya setiap individu yang telah melalui tempaan hari demi hari mampu melahirkan nilai-nilai etik sebagai modal dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nilai etik yang saya maksudkan diantaranya berupa kesederhanaan, kedisiplinan, kejujuran, kesetiakawanan, keikhlasan, kesabaran dan segala hal yang menjadi dasar keutamaan dalam kehidupan

pribadi dan sosial. Sebagai dasar keutamaan pribadi, seseorang akan memancarkan nilai spiritual dalam hal kesantunan akhlak yang terlihat dalam menjalankan pekerjaan apa saja, apakah sebagai warga negara biasa maupun warga kelas eksekutif, pemerintah. Kesederhanaan muncul dalam perilaku anti kesombongan, kedisiplinan lahir sebagai manifestasi anti kemalasan, kejujuran hadir dalam wujud anti korupsi, kesetiakawanan tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap sifat individualistik, keikhlasan tampak sebagai penolakan terhadap ketamakan, sedangkan kesabaran terbentuk sebagai antitesa dari sifat ketergesa-gesaan. Sebagai dasar keutamaan sosial semua nilai tadi berkelindan membentuk harmoni yang mengarahkan setiap individu dalam masyarakat pada terbentuknya budaya dan peradaban yang tinggi. Dalam realitas sosial kesederhanaan dapat menyempitkan disosiasi antara mereka yang kaya dan miskin. Semakin menganga lebar relasi keduanya semakin tinggi pula jurang kecurigaan yang berpotensi pada konflik berkepanjangan. Sebagai sebuah bangsa, kedisiplinan memberi kita produktivitas kolektif yang tak mudah dipertunjukkan bangsa lain. Selama ini, kemalasan rupanya telah merenggut kesadaran kita terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tak sepenuhnya dikuasai negara melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa lain. Kejujuran dalam realitas sosial seperti

sulit ditemukan di tengah meluasnya budaya korupsi. Ia seperti penyakit kronis yang tidak saja menyerang kaum muda, tua, pria, wanita, swasta, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi hingga institusi keagamaan sekalipun. Kejujuran lahir dari sanubari paling dalam, bukan sekonyong-konyong muncul karena pesanan dari majikan seperti bubur kacang ijo di depan kampus saya. Kesetiakawanan adalah jawaban bagi realitas sosial yang menampilkan dominasi dari karakter individualistik. Kesetiakawanan adalah modal sosial untuk mengangkat derajat mereka yang papa dan ter-alienasi karena tindakan diskriminasi. Kesetiakawanan adalah kepedulian sosial untuk membangun bangsa bukan kolusi yang dibalut nepotisme. Keikhlasan adalah modal sosial dalam menciptakan kesetaraan (equality). Keikhlasan adalah pertanda memberi kesempatan dan peluang bagi yang muda untuk mempersiapkan diri melayani yang tua dimasa pensiun. Keikhlasan adalah sifat memberi, bukan menahan apalagi sampai melarang dan membatasi hanya karena tak mau orang lain lebih baik dibanding dirinya. Keikhlasan adalah kerelaan untuk menyerahkan tongkat estafet bagi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Keikhlasan adalah kemampuan meruntuhkan sifat egoisme, mengusir ketamakan, dan melunturkan kerakusan dalam berkuasa dengan niat dan ambisi selama-lamanya. Sebagai modal sosial, kesabaran menjadikan kita mampu menghargai makna sebuah

proses dibanding hasil. Jika ia seorang seniman apakah artinya sebuah lukisan jika tanpa makna. Bagi seorang pemerintah apakah artinya pelayanan jika tanpa manfaat bagi masyarakatnya (outcome). Jika ia seorang ilmuwan apakah artinya jika gelarnya tak merepresentasikan ilmu, amal dan spiritualitasnya. Keilmuan merujuk pada kedalaman pengetahuan yang memungkinkan seseorang mampu menjadi lebih baik, berfaedah bagi diri dan lingkungannya, bukan sebaliknya menjadi perusak atas kedalaman ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika itu yang terjadi, maka apa yang dipikirkan J.J Rousseau dalam karya klasik tentang *Discourse on the Arts and Science* (1750) tampak menerpa realitas dunia pendidikan dan masyarakat kita, dimana kemajuan seni dan pengetahuan justru mengkorupsikan manusia dan menjerumuskan pada kehancuran moral. Manusia menurutnya tidaklah semakin menjadi manusia yang sesungguhnya, melainkan menjadi manusia artifisial, penuh dengan kemunafikan dan kebusukan. Rousseau menemukan bahwa sifat alamiah manusia justru raib ketika bersentuhan dan hidup dalam lembaga-lembaga sosial. Sifat alamiah (genuine) seperti keluguan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, dan kesetiakawanan terberangus oleh alasan seni dan pengetahuan. Seni dan pengetahuan tak lebih dari bunga-bunga di rawa kebusukan suatu masyarakat yang dieksploitasi oleh golongan atas yang korup untuk menindas golongan bawah yang tak punya

akses dan kekuatan untuk melawan (Suseno:1992). Lewat pandangan semacam itu Rousseau ingin menyingkapkan sifat artifisial dari kebudayaan dan masyarakat. Segala bentuk tata krama hanyalah selubung untuk tingkah laku yang sia-sia mencegah persahabatan sejati dan membuat kita tak lagi percaya pada sesama kita. Pada dasarnya, segala bentuk seni dan ilmu pengetahuan lahir dari kejahatan kita. Astronomi lahir dari takhyul, geometri dari ketamakan, fisika dari kemalasan, seni debat dari ambisi, dan etika dari kesombongan (Beraf:2012). Harus diakui bahwa pengamatan Rousseau terhadap realitas sosial haruslah menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan kita. Jika demikian, maka pertanyaan bagi ilmuan seperti saya adalah apakah ilmu pengetahuan yang terangkum dalam kurikula pendidikan telah mampu memurnikan moralitas anak didik sebagai kader pemerintahan sebagaimana dimaksud Rousseau dalam sejumlah nilai diatas? Ataukah justru saya dan kita semua telah merusaknya tanpa menyadarinya? Jika peserta didik kita berubah dari kritis menjadi apatis, berani menjadi pengecut, lugu menjadi munafik, pandai menjadi "cerdik", jujur menjadi pembohong, malu menjadi tak tau malu, solider menjadi individualistik, atau rajin tiba-tiba menjadi pemalas, maka penting untuk mempertanyakan kembali mengapa visi dan misi ideal dalam dunia pendidikan kita tak mampu menciptakan nilai dasar sebagai keutamaan hidup

secara individual dan sosial? Tampaknya kita mesti merenungkan kembali filosofi pendidikan klasik Pesantren Gontor, dimana metode lebih penting dari sekedar materi. Sebagus apapun materi, jika metode dalam bentuk keteladanan, penciptaan lingkungan yang kondusif, pengarahan, penugasan, pengajaran dan pembiasaan tak menemukan konkritisasinya, maka materi hanya akan tersimpan dalam rak buku peserta didik sebagai upaya menggugurkan kewajiban. Dibanding metode, guru tentu saja lebih penting, namun jauh lebih penting lagi jiwa guru (soul) daripada guru itu sendiri. Tanpa penjiwaan sebagai guru maka proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan tak lebih dari sekedar basa-basi. Jiwa guru harus lahir secara sadar sebagai bentuk pengabdian atas ilmu, amal dan nilai spiritualitasnya. Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk amal dan ibadah. Jika pada ranah filsafat ilmu Einstein mengatakan ilmu dimulai dari fakta dan berakhir pula pada fakta, maka dalam konteks filsafat agama ilmu diawali dari Tuhan dan berakhir pula pada Tuhan. Secara profesional ilmu dipertanggungjawabkan, lewat amal ilmu dibuktikan dan dimanfaatkan, melalui spiritualitas ilmu dijadikan sarana ibadah kepada Tuhan Yang Maha Berilmu. Mengutip Francis Bacon, semakin dalam pengetahuan kita terhadap suatu ilmu semakin dekat kita dengan Tuhan, sebaliknya semakin dangkal pengetahuan kita terhadap suatu ilmu semakin dekat kita pada atheisme. Dengan jiwa guru